

Analisis Kualitas Sumber Daya Manusia Terhadap Ketepatan Waktu Laporan SPJ Pengeluaran

(Studi Kasus pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur)

Mochamad Khoirul Machfuda¹, Hj. Nanik Kustiningsih, SE., MM²

^{1,2}STIE Mahardhika : Jl Wisata Menanggal No 42A, Dukuh Menanggal, Surabaya,
Telp. (031)8550077

³Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, STIE Mahardhika, Surabaya
Email : 1Khoirulmac@gmail.com, 2nanik@stiemahardhika.aac.id

Abstrak

Belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tentunya sangat berkaitan dengan setiap lembaga pemerintah. Belanja SKPD merupakan pengeluaran dana yang digunakan untuk membiayai kegiatan operasional kantor, dimana setiap pengeluaran atau belanja harus dilengkapi bukti yang lengkap dan sah yang akan digunakan untuk proses penyusunan SPJ Pengeluaran. Oleh karena itu, peneliti tertarik melakukan penelitian yang bertujuan untuk menganalisis pengaruh kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan pengendalian akuntansi internal terhadap ketepatan waktu pelaporan SPJ Pengeluaran di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur. Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif dan kuantitatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh langsung dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia, memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap ketepatan waktu laporan SPJ Pengeluaran Dinas

Kata Kunci : *kualitas sumber daya manusia, ketepatan waktu, laporan pertanggungjawaban*

Abstract

Expenditures for regional work units (SKPD) are of course closely related to every government agency. SKPD expenditure is an expenditure of funds used to finance office operational activities, where each expenditure or expenditure must be accompanied by complete and valid evidence that will be used for the process of preparing the SPJ for Expenditure. Therefore, researchers are interested in conducting research that aims to analyze the influence of the quality of human resources, the use of information technology, and internal accounting controls on the timeliness of reporting SPJ Expenditures at the Environmental Office of East Java Province. This research uses qualitative and quantitative analysis methods. The data source used is primary data obtained directly from the Environmental Office of East Java Province. The results showed that the Department of Environment of the Province of East Java showed that the quality of human resources had a positive and significant effect on the timeliness of the SPJ report on official expenditures.

Keyword : *the quality of human resources, timeliness, accountability*

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu bidang akuntansi sektor publik merupakan akuntansi keuangan daerah, yang menemukan atensi besar dari bermacam pihak semenjak tahun 1999- an. Perihal tersebut diakibatkan karena terjalin sistem pengelolaan yang kurang baik pada masa orde baru, sehingga Pemerintah Republik Indonesia mulai mempraktikkan kebijakan baru baru yang mereformasi pengelolaan keuangan daerah. Tujuan diimplementasikannya kebijakan tersebut merupakan untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik.

Bersumber pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No 21 tahun 2011 tentang Pergantian Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, hingga terjalin sebagian perubahan dalam tata kelola keuangan daerah. Salah satu pergantian dalam tata kelola keuangan daerah merupakan mulai diterapkannya Standar Akuntansi Pemerintah(SAP). Tidak hanya itu, pergantian dalam peraturan tersebut pula meliputi desentralisasi sistem akuntansi serta keuangan, dimana tiap Satuan Kerja Perangkat Daerah(SKPD) diberikan kedudukan serta tanggung jawab lebih besar buat mengelola keuangannya sendiri.

Penerapan aturan tersebut, sejauh ini diharapkan agar perangkat pengelolaan keuangan di lingkungan daerah dapat dikelola secara lebih transparan dan akuntabel, serta mengutamakan partisipasi masyarakat yang semarak sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat seperti biasanya. (Abdul Halim, 2014).

Standar akuntansi pemerintahan yang diterapkan dalam pengelolaan keuangan daerah bisa dilihat dalam pelaporan pertanggungjawaban penerapan Anggaran Belanja serta Pendapatan Daerah(APBD). Pertanggungjawaban penerapan APBD bersumber pada Permendagri No 13 tahun 2006 berbentuk laporan realisasi APBD, neraca daerah, laporan arus kas, serta catatan atas laporan keuangan sesuai SAP.

Sehingga sesudah adanya pergantian, sesuai dengan Permendagri No. 21 tahun 2011 pertanggungjawaban penerapan APBD dibuat dalam wujud laporan keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, Laporan Arus Kas(LAK), serta Catatan atas Laporan Keuangan(CaLK)

Sesuai dengan prinsip-prinsip pelaporan, yang salah satunya yaitu mengedepankan ketepatan waktu (timelines), maka Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Pengeluaran wajib disampaikan tepat waktu supaya bisa membuat laporan keuangan secara tepat waktu. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) adalah catatan yang menjelaskan penggunaan uang tunai yang dikelola oleh bendahara pengeluaran dan disertai dengan bantuan bukti transaksi berupa nota, kuitansi, dan berbagai bukti transaksi. Hal ini sesuai dengan prinsip penggunaan dana, dimana setiap pengeluaran atau pengeluaran harus disertai dengan alat bukti yang lengkap dan sah. Bendahara pengeluaran secara fungsional bertanggung jawab atas pengendalian kas yang dikuasai dan menyerahkan berkas tugas SKPD kepada PPKD selaku BUD paling lambat tanggal sepuluh setiap bulan. Terkait dengan pelaksanaan tugas penyusunan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Pengeluaran, DLH Provinsi Jawa Timur masih mengalami hambatan dalam menyusun SPJ Pengeluaran tersebut. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor faktor yang menyebabkan terjadinya keterlambatan dalam penyampaian SPJ Pengeluaran di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur

1.2 Rumusan Masalah

Apakah kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif serta signifikan terhadap ketepatan waktu laporan SPJ pengeluaran?

1.3 Tinjauan Literatur

A. Pengertian Akuntansi Sektor Publik

Akuntansi Sektor Publik merupakan aktivitas akuntansi yang dilakukan terhadap peristiwa serta transaksi keuangan organisasi sektor public (Siregar, 2015). Sektor publik mencakup instansi pemerintah (pemerintah pusat, daerah serta unit-unit kerja pemerintah), perusahaan milik negara BUMN/BUMD, Yayasan, ormas, orpol, LSM, universitas, serta organisasi nirlaba lainnya.

Akuntansi sektor publik ialah suatu alat informasi, sebab laporan keuangan organisasi sektor publik menyampaikan info bagi pemerintah juga masyarakat. (Mardiasmo, 2009) menyatakan “akuntansi sektor publik terkait menggunakan 3 hal utama, yaitu penyediaan informasi, pengendalian manajemen, serta akuntabilitas”.

B. Akuntansi Keuangan Daerah

(Halim & Kusufi, 2007) mendefinisikan Akuntansi keuangan daerah adalah salah satu bidang akuntansi akuntansi sektor publik. Akuntansi keuangan daerah merupakan proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, serta pelaporan transaksi keuangan berasal entitas pemda dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi yang dibutuhkan oleh pihak eksternal.

Pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 tahun 2006 dinyatakan bahwa keuangan daerah ialah seluruh hak serta kewajiban daerah dalam rangka peyelenggaraan Pemerintah Daerah yang bisa dievaluasi menggunakan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

C. Surat Pertanggungjawaban (SPJ)

(LAN & BPKP, 2000) mendefinisikan surat pertanggungjawaban (SPJ) sebagai salah satu bentuk laporan keuangan yang didapatkan oleh bendahara juga sudah memenuhi tujuan akuntabilitas. Hal tersebut disebabkan SPJ dirancang untuk pertanggungjawaban atas penggunaan dana (APBD) pada pihak yang lebih tinggi.

(Bastian,2007) mendefinisikan SPJ merupakan surat yang mempertanggung jawabkan pengeluaran-pengeluaran serta buku besar pembantu pengeluaran kas yang dilengkapi menggunakan bukti-bukti pengeluaran. bisa disimpulkan bahwa surat pertanggung jawaban pengeluaran ialah surat yang mempertanggung jawabkan penggunaan dana atas aktivitas yang dilaksanakan oleh lembaga atau institusi yang dilengkapi menggunakan bukti-bukti pengeluaran yang sah.

D. Kualitas Sumber Daya Manusia

Berdasarkan (Mustafa, S. & Rosidi, 2011) “Sumber daya manusia yang terbaik adalah potensi seseorang atau orang, korporasi (kelembagaan), atau mesin untuk menjalankan fungsi atau wewenangnya untuk memperoleh keinginannya secara efisien dan efektif. luar biasa harus ditinjau sebagai kemampuan untuk menuai kinerja secara keseluruhan, untuk membentuk output serta hasil hasil”.

Berdasarkan (Hasibuan, 2007) “pembagian kerja merupakan informasi tertulis yang mennguraikan tugas serta tanggung jawab, syarat pekerjaan, korelasi pekerjaan, serta aspek-aspek pekerjaan di suatu jabatan tertentu pada organisasi.”

Pada suatu organisasi, pembagian kerja sangat krusial dilakukan. Hal tersebut dikarenakan pada bidang ini seluruh pegawai mempunyai tugas serta perannya masing-masing. Dengan demikian, adanya pembagian kerja akan menghasilkan segala kegiatan yang ada didalam organisasi dibagi secara merata sesuai dengan kemampuan setiap anggota organisasi.

E. Ketepatan Waktu (Timeliness) Laporan SPJ Pengeluaran

Berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah bahwa “Bendahara Pengeluaran di Perangkat daerah harus mempertanggungjawabkan secara fungsional atas pengelolaan uang sebagai tanggung jawab dengan memberikan laporan pertanggung jawaban pengeluaran pada PPKD selaku BUD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya”.

Dalam yang kami lakukan ini, kami membuat pertimbangan dengan mencantumkan beberapa penelitian terdahulu sebagai referensi penelitian yang sedang kami lakukan :

1. Fadila Ariesta (2013) meneliti perihal “pengaruh Kualitas Sumberdaya manusia, Pemanfaatan Teknologi informasi, serta Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Nilai informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah pada SKPD Kabupaten Pasaman Barat”. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dampak kualitas SDM terhadap keterandalan, dampak kualitas SDM terhadap ketepatan waktu. penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan daerah pada Dinas yang berada di Kabupaten Pasaman Barat.
2. Nurmala (2016) “Faktor-Faktor yang mempengaruhi Ketepatan Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Bendahara SKPK di Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang” telah meneliti secara simultan faktor sumberdaya manusia bendahara, sarana dan prasarana, masa kerja bendahara, peraturan, intensitas pembinaan penatausahaan serta pertanggungjawaban bendahara SKPK serta ambiguitas peran Pemerintah berpengaruh terhadap ketepatan ketika penyampaian laporan pertanggungjawaban Pemerintah Daerah.

2. METODE PENELITIAN

2.1 Bentuk Penelitian

Bentuk penelitian yang akan digunakan untuk menganalisis penelitian mengenai “Analisis Kualitas Sumber Daya Manusia Terhadap Ketepatan Waktu Laporan SPJ Pengeluaran” adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif.

2.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan di Dinas Lingkungan Hidup Prov. Jatim, dengan jangka waktu penelitian dari bulan Juni 2021 sampai dengan Juli 2021.

2.3 Data

Data yang digunakan pada penelitian ini merupakan data primer. Menurut (Istijanto, 2006) “Data primer merupakan data asli yang dikumpulkan sendiri sang penulis untuk menjawab persoalan penelitiannya secara spesifik”. Data primer pada penelitian ini diperoleh menggunakan metode pengumpulan data survey serta wawancara

2.4 Variabel Penelitian

a. Variabel Independen (X)

Kualitas SDM menyangkut banyak aspek, yaitu aspek sikap mental, perilaku, aspek kemampuan, aspek intelegensi, aspek agama, aspek hukum, aspek kesehatan dan sebagainya. Kesemua aspek ini merupakan dua potensi yang masing-masing dimiliki oleh tiap individu, yaitu jasmaniah dan ruhaniah. Tidak dapat dipungkiri bahwa aspek jasmaniah selalu ditentukan oleh ruhaniah yang bertindak sebagai pendorong dari dalam diri manusia. untuk mewujudkannya. Adapun indikator variable sumber daya manusia, yaitu sebagai berikut

Tabel 1.1

Indikator Variabel Sumber Daya Manusia

No.	Indikator	Skala
1	Pemahaman tentang akuntansi	1-5
2	SDM yang berkualitas	1-5
3	Sumber daya yang memadai	1-5
4	Peran tanggung jawab	1-5

5	Pelatihan keahlian dalam tugas	1-5
6	Sosialisasi peraturan baru	1-5
7	Pemahaman tentang struktur organisasi	1-5

b. Variabel dependen (Y)

tujuan umum dari laporan ekonomi adalah untuk menawarkan data tentang fungsi moneter, kesadaran anggaran, arus kas, dan kinerja moneter dari entitas pelaporan yang berguna bagi pengguna dalam membuat dan mengevaluasi pilihan mengenai alokasi aset. khususnya, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menawarkan catatan yang bermanfaat untuk pengambilan keputusan

Laporan keuangan untuk tujuan umum juga mempunyai peranan prediktif dan prospektif, menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi besarnya sumber daya yang dihasilkan dari dan untuk operasi yang berkelanjutan, serta risiko dan ketidakpastian yang terkait. Informasi dalam laporan keuangan tersebut relevan untuk memenuhi tujuan laporan keuangan pemerintah, namun tidak dapat sepenuhnya memenuhi tujuan tersebut. Informasi tambahan, termasuk laporan non keuangan, dapat dilaporkan bersama-sama dengan laporan keuangan untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai aktivitas suatu entitas pelaporan selama satu periode. Adapun indikator variabel kualitas laporan keuangan daerah adalah sebagai berikut :

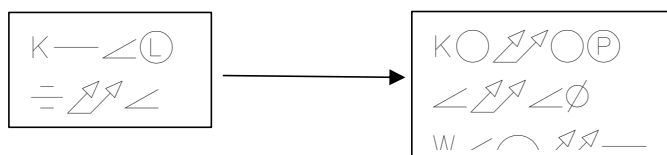
Tabel 1.2

Indikator variabel Ketepatanwaktuan Laporan SPJ Pengeluaran

No.	Indikator	Skala
1	Aktivitas keuangan dimasa lalu	1-5
2	Memprediksi masa yang akan datang	1-5
3	Ketepatanwaktuan penyajian	1-5
4	Pengambilan keputusan	1-5
5	Sesuai SAP	1-5

6	Informasi dalam laporan keuangan dapat dipahami	1-5
---	---	-----

2.5 Model Penelitian dan Pengembangan Hipotesis



Gambar 1 . Model Penelitian

Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia Terhadap Ketepatan Waktu Laporan SPJ Pengeluaran

Menurut Tjiptoherijanto (2001) dan Faristina Rosalin (2011), “untuk menilai kapasitas serta kualitas sumber daya manusia dalam melaksanakan suatu fungsi, termasuk fungsi akuntansi, bisa ditinjau dari level of responsibility dan kompetensi sumber daya tersebut. Tanggung jawab bisa ditinjau dari atau tertuang pada deskripsi jabatan. Deskripsi jabatan ialah dasar untuk melaksanakan tugas dengan baik. Tanpa adanya pelukisan jabatan yang jelas, asal daya tersebut tidak bisa melaksanakan tugasnya dengan baik. Sedangkan kompetensi bisa ditinjau berasal latar belakang pendidikan, pembinaan-pembinaan yang pernah diikuti, serta berasal keterampilan yang dinyatakan pada aplikasi tugas”.

H : Kualitas Sumber Daya Manusia Berpengaruh Positif dan Signifikan Terhadap Ketepatan Waktu (Timeliness) Laporan SPJ Pengeluaran

2.6 Metode Analisis

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dan kuantitatif dengan program SPSS 24.

2.7 Model Regresi

$$Y = \alpha + \beta X$$

Dimana:

Y = Ketepatan Waktu Laporan SPJ Pengeluaran

α = Konstanta

β = Koefisien Regresi

X = Kualitas Sumber Daya Manusia

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Analisis Kualitas Sumber Daya Manusia Terhadap Ketepatan Waktu (Timeliness) Laporan SPJ Pengeluaran

Berdasarkan hasil analisis statistik dalam penelitian ini diketahui bahwa variabel kualitas sumber daya manusia (X) memiliki nilai β 0,307 yang memiliki arti jika variabel bebas lainnya konstan atau sama dengan nol, untuk setiap peningkatan kualitas sumber daya manusia sebesar 0,307 akan menyebabkan meningkatnya ketepatan waktu (timeliness) laporan pertanggungjawaban pengeluaran sebesar 0,307, serta memiliki t hitung $2,035 > t$ tabel $1,674$ dan nilai signifikansi $0,047 < 0,05$ yang memiliki arti bahwa hipotesis (H) diterima dan dapat disimpulkan bahwa kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketepatan waktu (timeliness) laporan SPJ Pengeluaran. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Fadila Ariesta (2013) dan Nurmala (2016), yang menyatakan bahwa kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketepatan waktu (timeliness) pelaporan keuangan.

4. KESIMPULAN

Hasil uji parsial (uji t) menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif serta signifikan terhadap ketepatan waktu (timeliness) laporan SPJ Pengeluaran Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur. Hal ini berarti bahwa semakin baik kualitas sumber daya manusia di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur maka semakin tepat waktu dalam penyampaian laporan pertanggungjawaban khususnya SPJ Pengeluaran. Sebaliknya, semakin buruk kualitas sumber daya manusia di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur maka semakin tidak tepat waktu dalam penyampaian laporan pertanggungjawaban khususnya SPJ Pengeluaran

5. SARAN

Setelah melakukan penelitian ini, berikut beberapa hal yang menjadi rekomendasi dari penulis untuk menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan sesuai tugas dan fungsinya, khususnya untuk pegawai yang terkait proses laporan pertanggungjawaban agar diberikan sosialisasi mengenai Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.05/2008 tentang “tata cara penatausahaan dan penyusunan laporan pertanggung jawaban Bendahara Kementrian Negara, Lembaga, Kantor, serta Satuan Kerja”.
2. Menerapkan manajemen penilaian risiko dan disosialisasikan kepada seluruh pegawai.
3. Penempatan pegawai yang sesuai pada kompetensi yang dimiliki, sehingga pekerjaan dapat berjalan lebih efektif dan efisien.
4. Mengadopsi solusi/ sistem dari OPD lainnya yang telah berhasil dalam pengelolaan/penatausahaan pengeluarannya dan dalam penyampaian laporan pertanggungjawaban tidak mengalami keterlambatan atau selalu tepat waktu.

DAFTAR PUSTAKA

Artikel :

- Abdul.Halim,(2014).*Akuntansi Sektor Publik : Akuntansi Keuangan Daerah*.Jakarta:Salemba Empat
- Siregar,(2015).*Metode Penelitian Kuantitatif*.Jakarta:Prenadamedia Group.
- Mustafa.S,Sutrisno dan Rosidi,(2011). *Analisis Faktor- faktor yang berpengaruh terhadap Keterandalan dan Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan pada SKPD Pemerintah Daerah Kota Kendari*.
- Hasibuan,MalyuS.P,(2007),*Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*, Bandung,PT.Bumi Aksa
- Nurmala,(2016). *Faktor-FaktorYang Mempengaruhi Ketepatan PenyampaianLaporan Pertanggung jawabanBendahara SKPK Pada Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang*.

Ariesta,F.(2013).*Pengaruh Kualitas Sumberdaya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah*, Universitas Negeri Padang,Indonesia.

Faristina.Rosalin.(2011).*Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keandalan dan Timeliness Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum, Studi pada BLU di Kota Semarang*.Skripsi Universitas Diponegoro:Semarang.

Istijanto,(2006).*Riset Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama

Mardiasmo.(2009).*Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta:Andi Yogyakarta.

Buku :

LAN dan BPKP.(2000).*Akuntabilitas dan Good Governance (Modul Sosialisasi Sistem AKIP)*. Modul 1 dari 5.Jakarta:LAN

Sumber Internet :

Peraturan Gubernur Jawa Timur No 14 Tahun 2021 *Tentang Perubahan atas Pergub No 65 tahun 2020 tentang Pedoma Kerja dan Pelaksanaan tugas pemerintah daerah provinsi Jawa Timur*

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 *Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 *Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.